

**Islam Nusantara: Antara Argumen
Politis, Spiritual, dan Epistemologis**
Arif Budiman

**Kelahiran dan Perkembangan
Lesbumi: Suatu Studi Historis**
Johan Wahyudi

**Pelaksanaan Ibadah Haji Masa
Hindia Belanda: Tinjauan Kritis
Terhadap Pemikiran C. Snouck
Hugronje**
Lesi Maryani dan Andriyansyah

**Strategi Keamanan Maritim
Singapura dan Dampaknya Bagi
Indonesia**
Pradito Komojoyo

**Implementation Gap Dalam
Kebijakan Pemberian Beasiswa
Siswa Unggul Papua di Luar Negeri**
Muhammad Rizal Otto

**Efektivitas Strategi Deradikalisasi
Pada Narapidana Terorisme di
Rutan Cikeas**
Dini Probawati

ISSN 2621-4938
e-ISSN 2621-4946

THE INTERNATIONAL JOURNAL OF
PeGON
ISLAM NUSANTARA CIVILIZATION

Volume 10 . issue 2 . 2023

THE INTERNATIONAL JOURNAL OF
PeGON
ISLAM NUSANTARA CIVILIZATION
Vol. 10 - Issue 2 - 2023

The International Journal of Pegon: Islam Nusantara Civilization published by Islam Nusantara Center Foundation. This journal specialized academic journal dealing with the theme of religious civilization and literature in Indonesia and Southeast Asia. The subject covers textual and fieldwork studies with perspectives of philosophy, philology, sociology, anthropology, archeology, art, history, and many more. This journal invites scholars from Indonesia and non Indonesia to contribute and enrich the studies published in this journal. This journal published twice a year with the articles written in Indonesian, Pegon, Arabic and English and with the fair procedure of blind peer-review.

Editorial Team

Editor-In-Chief

A. Ginanjar Syaban (*Director of Islam Nusantara Center*)

Managing Editor

Mohamad Shofin Sugito

Peer Reviewer

Abdurahman Mas'ud (*Ministry of Religious Affairs, The Republic of Indonesia*) Oman
Fathurrahman (*State Islamic University of Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia*) MN.
Harissuddin (*State Islamic University of Jember, Indonesia*)
KH. Abdul Mun'im DZ (*The Vice General Secretary of PBNU*)
Farid F Saenong (*State Islamic University of Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia*)
Ngatawi al Zastrouw (*University of Nahdlatul Ulama Indonesia*)
Islah Gusmian (*State Islamic University of Surakarta, Indonesia*)
Zainul Milal Bizawie (*Islam Nusantara Center Jakarta, Indonesia*)

Editors

Johan Wahyudi
Mohammad Taufiq
Ahmad Ali

Asistant Editors

Muhammad Anwar
Zainal Abidin
Zainul Wafa

ISSN 2621-4938

e-ISSN 2621-4946

Published by:

ISLAM NUSANTARA CENTER (INC)
Wisma Usaha UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (BANK BNI) Lt. 2,
Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangerang Selatan Banten
<http://ejournalpegon.jaringansantri.com/ojs/>

 Islam Nusantara Center



TABLE OF CONTENTS

The International Journal of **PEGON**

Islam Nusantara Civilization

Vol. 10 - Issue 2 - 2023

Table of Contents	iii
ISLAM NUSANTARA: ANTARA ARGUMEN POLITIS, SPIRITUAL, DAN EPISTIMOLOGIS Arif Budiman	1
KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN LESBUMI: SUATU STUDI HISTORIS Johan Wahyudi	23
PELAKSANAAN IBADAH HAJI MASA HINDIA BELANDA: TINJAUAN KRITIS TERHADAP PEMIKIRAN C. SNOUCK HUGRONJE Lesi Maryani dan Andriyansyah	43
STRATEGI KEAMANAN MARITIM SINGAPURA DAN DAMPAKNYA BAGI INDONESIA Pradito Komojoyo	59
IMPLEMENTATION GAP DALAM KEBIJAKAN PEMBERIAN BEASISWA SISWA UNGGUL PAPUA DI LUAR NEGERI Muhammad Rizal Otto	77
EFEKTIVITAS STRATEGI DERADIKALISASI PADA NARAPIDANA TERORISME DI RUTAN CIKEAS Dini Probowati	99

PELAKSANAAN IBADAH HAJI MASA HINDIA BELANDA: TINJAUAN KRITIS TERHADAP PEMIKIRAN C. SNOUCK HUGRONJE

Lesi Maryani

STAI Al-Aqidah Al-Hasyimiyyah Jakarta
maryanilesi89@gmail.com

Andriyansyah

STAI Bani Saleh Bekasi
andriyansyahbekasi@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.51925/inc.v9i01.82>

أبستراك

توليسان إيني مينجىلاسلان تينتاغ أناليسا كرئيس أناس فميكبران سنأوچك هوزكرونجي، فیناسمات فیمیرنتاه هیندیاً بیلاندا، تینتاغ قی ییلیغ کپاران حاجی دی نوسنتارا. سیباکپای سوسوک یاغ بیزکیچیم فو غ لاما دالام ترادیسى کایلموأن دی مکة، إیا ميم فو ی ای چوکوف بیکال دالام مینیلای بالک ایمانا موتیف، فیریلاکو سیرتا فیروباهان یاغ دیالامی أومات مسلم سات بیرهaji دان سیفولاغ ُی ای داری حاجی. سیچارا أوموم، فیمیرنتاه هیندیاً بیلاندا می غ ا ک ف فارا حاجی سیباکپای سو مبر فیمبوات ماسالاه سوسیال. دی غ ان می غ هینتیکان فیریداران ی، ماکا دافات می غ وراغی أنچامان أتاس روست این اوردی. سنأوچک تیداک سی فاکات دی غ ان ا ک ف ان إیتو دان جوسترو می یارانکان اچار فیمیرنتاه لیبیه میفاسیلیتاسی کبیراغ کاتان حاجی دی نوسنتارا. ارتیکیل ایی دیتولیس سیتلاه میلیواتی فاسی فینیلیتیان سیجاراه یاغ بیرتوم فو فاذا کی اکتان مینچارای سو مبر، کرتیک سو مبر، اینتیز فارتاسی دان فینولیسان سیجاراه.

كاتا كونچي: هاجي، كولونياليسمي، فيروباهان دان كريتيك.

Abstrak

Tulisan ini menjelaskan tentang analisa kritis atas pemikiran Snouck Hurgronje, penasehat pemerintah Hindia Belanda, tentang penyelenggaraan haji di Nusantara. Sebagai sosok yang berkecimpung lama dalam tradisi keilmuan di Mekkah, ia mempunyai cukup bekal dalam menilai bagaimana motif, perilaku serta perubahan yang dialami umat Muslim saat berhaji dan sepulangnya dari haji. Secara umum, Pemerintah Hindia Belanda menganggap para haji sebagai sumber pembuat masalah sosial. Dengan menghentikan peredarannya, maka dapat mengurangi ancaman atas *rust en orde*. Snouck tidak sepakat dengan anggapan itu dan justru menyarankan agar pemerintah lebih memfasilitasi keberangkatan haji di Nusantara. Artikel ini ditulis setelah melewati fase penelitian sejarah yang bertumpu pada kegiatan mencari sumber, kritik sumber, interpretasi dan penulisan sejarah.

Kata kunci: *Haji, Kolonialisme, Perubahan dan Kritik.*

Abstract

This paper describes a critical analysis of the thoughts of Snouck Hurgronje, advisor to the Dutch East Indies government, on the implementation of Hajj in the archipelago. As a long-time scholarly in Mecca, he is well-equipped to assess the motives, behaviours and changes Muslims experience during Hajj and after returning from Hajj. In general, the Dutch East Indies government regarded the pilgrims as a source of social trouble-making. By stopping its circulation, it can reduce the threat of *rust en order*. Snouck did not agree with this assumption and instead suggested that the government facilitate more Hajj departures in the archipelago. This article was written after passing through the phase of historical research which relies on the activities of finding sources, source criticism, interpretation and writing history.

Keywords: *Haji, Colonialism, Change and Criticism.*

A. PENDAHULUAN

Sejak masuknya Islam ke Nusantara, sebagian masyarakat Nusantara menginginkan dapat berangkat haji ke Mekkah. Berbagai informasi yang mereka dapatkan dari pemuka-pemuka agama Islam tentang ritual tersebut, ditambah lagi, haji merupakan bagian terpenting dari rukun agama Islam yang ke-5, membuat masyarakat pribumi semakin penasaran dan ingin menunaikan ibadah haji mereka untuk menyempurnakan ibadahnya.

Dalam beberapa literatur dikatakan bahwa pada mulanya masyarakat pribumi yang antusias berhaji, terkendala oleh kapal yang membawa mereka ke Mekkah. Sebagian kapal yang bersandar di pelabuhan Nusantara merupakan kapal para saudagar dari India dan Arab yang mereka datang ke Nusantara untuk berdagang bukan untuk mengangkut jamaah haji.¹

Munculnya kebijakan haji sendiri mulai diberlakukan ketika pemerintah kolonial Belanda merasa keberadaannya akan terancam. Banyak orang yang setelah melakukan ibadah haji menjadi pelopor pembaharu dalam bidang keagamaan. Mereka tidak segan berbeda sudut pandang mengenai kebijakan yang diterapkan oleh kolonial Belanda, yang sebagian besar dianggap merugikan masyarakat Nusantara, khususnya bagi para calon jamaah haji di Batavia.

Pada 1859, banyak kebijakan yang diterapkan oleh Belanda untuk para calon jamaah haji di Batavia. Kebijakan ini diantaranya adalah keharusan mempunyai bekal yang cukup dan memiliki surat izin untuk melakukan ibadah haji dari penguasa setempat, adanya keterangan yang jelas mengenai kepulauan jamaah haji, serta adanya pelatihan khusus bagi para jamaah setelah melakukan ibadah haji agar memperoleh sertifikat dan diperbolehkannya memakai pakaian haji. Jika di kemudian hari mereka tidak memenuhi syarat yang ditentukan, maka akan dikenakan denda²

Lahirnya kebijakan haji sendiri diharapkan dapat mempermudah para calon jamaah untuk melaksanakan ibadah haji. Pada kenyataannya, kebijakan yang tertera dalam ordonansi (undang-undang atau regulasi) yang

¹ Arsip Nasional RI, Surat C Snouck Hugronje Kepada Direktur Pendidikan Agama dan Kerajinan, tertanggal Betawi, 26 September 1897.

² Ketetapan tentang denda yang harus dibayar pada tercantum dalam Ordonansi 6 Juli 1859 No. 42; dicantumkan kembali pada Ordonansi tahun 1902 No. 381. Lihat *Staatblad Van Nederlandsch-Indie* 12 Agustus Tahun 1902 No. 318.

dibuat pada 1859 tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat saat Ordonansi tahun 1859 menjelaskan bahwa akan adanya perbaikan fasilitas kapal yang akan mengangkut para calon jamaah haji, maupun fasilitas kesehatan serta kebutuhan pokok. Kenyataannya, banyak para calon jamaah haji yang tidak mendapatkan fasilitas yang layak.³

Selanjutnya, ordonansi sendiri merupakan sebuah kebijakan yang meliputi persoalan-persoalan terkait masalah hubungan antara pemerintah kolonial Belanda dengan rakyat Batavia. Keberadaan Ordonansi haji yang dirumuskan oleh pemerintah kolonial diperuntukkan guna mengatur rakyat Batavia agar patuh terhadap peraturan Kompeni. Dengan demikian, masyarakat pribumi yang akan melakukan pemberontakan dapat terdeteksi oleh Pemerintah Hindia Belanda..

Seiring berjalannya waktu, timbul kekhawatiran pemerintah kolonial disebabkan eratnya rasa persaudaraan dan persatuan di kalangan rakyat pribumi, yang berpotensi menimbulkan pemberontakan. Ibadah bersama dianggap sebagai katalisator pengumpul massa pribumi. Oleh sebab itu, berbagai macam bentuk peribadatan sangat dibatasi oleh pemerintah Belanda termasuk pembatasan mengenai ibadah haji. Sejak saat itu, pemerintah sangat berhati-hati terhadap orang yang kembali ke Tanah Air setelah berhaji. Ia berpotensi merubah diri, mulai dari perubahan sikap, tingkah laku, hingga menjadi pembaharu untuk penduduk setempat, yang di mata Kompeni disebut propagandis. Selain itu, pemerintah menghawatirkan pandangan politik para jamaah haji yang mengalami perubahan setelah mereka berinteraksi dan memperoleh berbagai informasi tentang dunia Islam dari berbagai belahan dunia, dari si haji.⁴

Christian Snouck Hurgronje lahir pada tanggal 8 Februari 1857 di Oosterhout, Belanda, dan meninggal dunia di Leiden tanggal 26 Juni 1936. Ia adalah seorang orientalis (ahli ketimuran) berkebangsaan Belanda, ahli Bahasa Arab, ahli agama Islam, ahli bahasa dan kebudayaan Indonesia, dan penasihat pemerintah Hindia Belanda dalam masalah keislaman. Snouck Hurgronje tiba di Batavia pada 11 Mei 1889. Lima hari setelah kedatangannya, tepatnya pada 16 Mei 1889, keluarlah beslit Gubernur Jenderal yang mengangkat Snouck Hurgronje sebagai petugas peneliti Indonesia selama dua tahun, dengan gaji f.700,- sebulan. Penugasan Snouck

³ Anonim, "Hal-ihwal Perdjalanana Naik Hadji jang laloe di Kamaran, 1927-1937", dalam *Pandji Poestaka*, No. 81, Tahun XV, edisi 8 October 1937

⁴ Muhammad M. Basyuni, *Reformasi Manajemen Haji* (Jakarta: FDK Press, 2008) hal, 46

kemudian dikuatkan dengan beslit Raja. Snouck menetap sementara di Batavia dan setelah itu ia menjadi peneliti Islam di Jawa dan juga Sumatera khususnya Aceh.⁵

Sesuai dengan penjelasan dalam kutipan di atas, sangat jelas dengan berpura-pura menganut agama Islam, Snouck Hurgronje atau Abdul Gaffar dapat leluasa bergaul dengan umat muslim, baik umat muslim Mekkah, Jawa maupun dari Aceh. Dari pergaulan inilah Snouck Hurgronje mendapatkan jawaban dari sekelumit informasi yang ia cari. Di Mekkah ia menjumpai para jamaah haji Indonesia yang telah menimbulkan keheranan pada orang-orang di sana dengan cerita-cerita mereka tentang perang Belanda di Aceh. Lalu timbullah sebuah gagasan padanya untuk melakukan penyelidikan di Aceh seperti yang dilakukannya di Mekah dan di Jeddah.⁶

B. METODE

Artikel ini ditulis setelah melewati penelitian dengan menggunakan metode penelitian sejarah. Adapun langkah yang ditempuh adalah pencarian sumber, kritik sumber, interpretasi dan penulisan sejarah.⁷

Pencarian sumber dilakukan dengan mengunjungi sejumlah peprustakaan yang menyimpan buku tulisan Snouck Hurgronje. Sebagai sosok yang gemar melihat aneka fenomena umat islam di Nusantara, Snouck mendedikasikan dirinya untuk memberikan nasehat melalui lembaga yang dipimpinya, *Het Kantoor voor Inlandsch en Arabisch Zaken*, kepada para pejabat kolonial yang bertugas, mulai dari lingkungan pusat dan daerah. Buku-buku yang berbicara tentang ini terdapat dalam seri *Nasihah-Nasihah C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936* (1990).

Terdapat sejumlah buku yang digunakan dalam penulisan artikel ini. M Dien Majid dalam bukunya yang berjudul *Berhaji Masa Kolonial* menjelaskan bagaimana perjalanan haji begitu sarat dengan banyaknya

⁵ <https://repositori.kemdikbud.go.id/19241/1/2012%20-%20Christian%20Snouck%20Hurgronje.pdf>, diakses tanggal 11 April

⁶ Paul Van 'T Veer, *Perang Belanda di Aceh*. (Jakarta: PT Grafiti Pers, 1985) h. 151.

⁷ Tentang metode penelitian sejarah lihat M. Dien Madjid dan Johan Wahyudi, *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2014) h. 120-130; Lihat juga M. Dien Madjid, *Metode Sejarah* (Jakarta: Kencana, 2021)

tantangan.⁸ Buku ini menjelaskan bagaimana Belanda pada saat itu memimpin pemerintahan di Nusantara untuk mengambil alih apapun yang ada di Nusantara begitupun kebijakan Haji masa itu dengan berbagai macam kebijakan ordonansinya. Selain itu, Snouck dalam hal ini memiliki peran penting terhadap kebijakan haji karena dia salah satu penasihat dalam pemerintah Hindia Belanda. Namun dalam buku ini penguatan pada teori-teori yang dimaksud masih belum memenuhi syarat dalam sebuah tulisan yang ilmiah. Masih berupa deskripsi bagaimana keadaan perjalanan haji kala itu.

Henry Chambert Lloir dengan judul buku *Naik Haji di Masa Silam : Kisah orang-orang Indonesia Naik Haji 1482-1962* berupaya mengupas aneka fenomena haji mulai dari masa perkembangan Islam awal, yakni seputar era Wali Songo hingga era kontemporer. Lloir mengumpulkan serpihak informasi haji mulai dari manuskrip hingga memoar para pesohor yang terinspirasi dengan perjalanan hajinya. Ia memberikan sumbangan yang penting dalam sejarah Indonesia, bahwa sejarah haji menempati episode penting dalam khazanah pembaruan pemikiran dan pemaknaan Islam di Nusantara.⁹

Muhammad Irfai Muslim menulis artikel berjudul *Historiografi Manajemen Haji di Indonesia: Dinamika dari masa Kolonial Hingga Kemerdekaan*. Perkembangan penyelenggaraan haji dari masa ke masa menjadi menarik untuk didiskusikan. Karena ibadah haji pasti akan berulang. Dengan memahami perkembangan sejarah haji Indonesia, dapat dijadikan harapan dan juga pembelajaran bagi para pengampu kebijakan, juga bagi masyarakat yang menginginkan perbaikan penyelenggaraan haji ke depan. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan perkembangan ibadah haji dari masa kolonial hingga era reformasi, dan juga peran pemerintah dalam perbaikan haji setiap tahunnya, demi mencapai suatu layanan yang diidam-idamkan oleh masyarakat sesuai dengan harapan dengan memperhatikan asas pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jamaah haji.¹⁰

Moh. Khotimussalammembicarakan peran Snouck Hurgronje dalam

⁸ M. Dien Majid, *Berhaji di Masa Kolonial* (Jakarta: CV. Sejahtera, 2008)

⁹ Henry Chambert Lloir, Ed, *Naik Haji Masa Silam: Kisah orang-orang Indonesia Naik Haji 1482-1962* (Jakarta: KPG, EFEO, Forum Jakarta-Paris, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2013)

¹⁰ Muhammad Irfai Muslim, "Historiografi Manajemen Haji Di Indonesia: Dinamika Dari Masa Kolonial Hingga Kemerdekaan", dalam *Jurnal MD*, Vol. 6, No. 1, 2020, h. 51-66.

penataan masyarakat Islam di Nusantara lewat artikel *The Dutch Islamic Policies: Peran Politik Christian Snouck Hurgronje di Wilayah Hindia-Belanda*. Sebelum kedatangan Snouck Hurgronje, kebijakan Belanda terhadap warga muslim pribumi masih abu-abu. Hal itu karena ketidaktahuan pihak Belanda terhadap ajaran dan masyarakat Islam di sana. Setelah melakukan studi keislaman di Makkah selama sekitar dua tahun, Hurgronje diminta untuk datang ke Indonesia dan ditugaskan untuk meneliti Aceh kemudian Jawa. Setelah itu, barulah muncul kebijakan-kebijakan khusus Pemerintah Hindia-Belanda berkaitan dengan Islam yang pertama kali digagas oleh Hurgronje. Akhirnya, ia dikenal sebagai peletak dasar sistem *islam politiek* yang tujuan utamanya untuk melanggengkan kekuasaan Belanda di daerah jajahannya.¹¹

C. TEMUAN

Snouck Hurgronje merupakan sosok yang kritis terhadap kedudukan Muslim dalam strata masyarakat Nusantara. Kendati secara historis menunjukkan bahwa banyak kesultanan Islam yang berkontribusi dalam kemajuan peradaban Nusantara, ia tidak serta merta terpukau dan terkesan dengan pencapaian itu. Sebaliknya, dalam sejumlah tulisannya, ia tidak segan menyebutkan bahwa kemegahan masa lalu itu tidak lebih hanyalah legenda yang terus diceritakan.

Dalam pemikiran snouck, orang Eropa harus berhati-hati ketika memandang eksistensi umat muslim. Mereka merupakan entitas yang bergerak yang dapat mengancam kedudukan kolonial. Dalam sudut pandang ini, maka hendaknya setiap pejabat kolonial harus berhati-hati dengan potensi politik Islam (*islam politiek*) di mana jumlah umat muslim yang besar dapat didistribusikan untuk mencanangkan kekuatan semesta menentang Belanda. Jadi, ia menghimbau agar para pegawai Eropa, pengusaha Eropa atau orang Eropa berlatar profesi lainnya harus meninjau lebih dalam kebaikan yang ditunjukkan setiap Muslim.

Di sisi lain, kecurigaan berlebih pada muslim, bukan pula ditafsirkan sebagai pengobaran semangat islamofobia. Antipati berlebihan terhadap muslim, akan mengundang kebencian yang besar, yang dapat dimanipulir menjadi kekuatan penentang kedudukan kolonial. Sebab itu, langkah yang

¹¹ Mohammad Khotimussalam, "The Dutch Islamic Policies: Peran Politik Cristian Snouck Hurgronje Di Wilayah Hindia-Belanda", dalam *Jurnal Tamaddun*, Vol. 7, No. 1, 2019.

dapat dicanangkan adalah dengan mendiamkan atau memberikan peluang agar umat muslim dapat beribadah dengan tenang, sesuai dengan tradisi dan adat tempatan. Pengumpulan massa yang berlebihan jangan segera dianggap sebagai upaya untuk melawan pemerintah. Pemerintah kolonial hendaknya harus terus belajar cita kebudayaan Nusantara secara kolektif dan bekeringinambungan, agar dapat menggulirkan suatu kebijakan tidak salah arah.

Snouck melancarkan kritik keras pada kaum tarekat sebagai salah satu perkumpulan muslim yang dianggapnya sebagai biang keladi atas mengobarnya semangat anti kolonialisme di kalangan penduduk pribumi. Kendati kelompok ini terlihat seperti sejumlah pertapa yang mengasingkan diri dari keramaian, sesuai dengan doktrin yang dianutnya, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang meninggalkan urusan duniawi dan mengejar urusan akhirat dan senantiasa menjaga kedekatan dengan Tuhannya, namun dalam kaca mata Snouck itu bukan satu persepsi yang holistik untuk menilai siapa sejatinya kaum tarekat itu.

Guru tarekat mempunyai wibawa yang besar di mata murid tarekatnya dan masyarakat secara umum. Apabila ia tidak menggunakan pengaruhnya untuk mendorong kampanye politik muridnya, maka itu bukanlah persoalan serius. Yang sering ditemukan, adanya kasus sejumlah guru tarekat yang terlibat aktif dalam membina dan menggerakkan penduduk di sekitarnya untuk menentang kepentingan kolonial.

Patronase yang unik antara guru tarekat dengan masyarakatnya, mendorong Snouck untuk melakukan riset yang lebih dalam di Mekkah. Di sana ia menemukan fakta bahwa banyak guru tarekat Nusantara yang menunaikan ibadah haji. Sepulangnya dari Mekkah, mereka aktif terlibat membina masyarakat lewat perkumpulan yang diasuhnya, dan yang tentu saja berbahaya adalah ketika mereka mendorong murid dan masyarakatnya untuk melawan Pemerintah Hindia Belanda.¹²

Selain melalui nasehatnya kepada para pejabat kolonial, Snouck juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat pribumi untuk mewaspadai aktivitas para guru tarekat dengan bekerjasama dengan Habib Usman bin Yahya, Mufti Betawi.¹³ Sosok ini menjadi teman karib Snouck, utamanya

¹² C. Snouck Hugronje, *Nasihat-Nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936, Vol I* (Jakarta: INIS, 1990) h. 12-13

¹³ Azyumardi Azra, *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal* (Bandung: Mizan, 2002) h. 158; Lihat juga Jajat Burhanudin, "The Dutch Colonial Policy on

dalam membahas bagaimana cara mengelola kondisi umat Islam agar senantiasa tertib dan teratur. Habib Usman pun melakukan usaha penyadaran dengan menulis sejumlah kitab yang berkenaan dengan ajaran tarekat serta bagaimana menyikapinya. Salah satu kitab yang membahas tentang ini adalah *al-Watsiqah al-Wafiyah*.¹⁴

Antara Snouck dan Habib Usman mempunyai ikatan persahabatan yang kuat. Menurut Karel Steenbrink, keduanya sering terlibat percakapan dengan Bahasa Arab. Kedekatan dengan Snouck, digunakan Habib Usman untuk menyebarkan brosur dan kitab tulisannya ke sekitar Batavia bahkan sampai ke luar kota. Jika terdapat masalah sosial keagamaan pribumi yang tidak bisa dipecahkan oleh Snouck, maka ia akan berkonsultasi pada sahabatnya itu. Snouck mengakui kepakaran Habib Usman dalam hukum Islam. Selain itu, ia juga mempunyai kedudukan yang istimewa di kalangan umat Islam, yakni dari latar belakang keluarganya yang masih terhubung dengan Nabi Muhammad. Modal tersebut dimanfaatkan Snouck untuk memperkuat posisinya sebagai pakar yang menjadi rujukan atas masalah sosial dan keagamaan di Nusantara.¹⁵

Snouck menduga, telah terjalin semacam kerjasama warga pribumi yang ada di Nusantara dengan yang berdiam di Mekkah. Waktu haji adalah momen yang tepat untuk memperbaharui atau sebagai sarana bertukar informasi penting, terkait dengan rencana pemerintahan Hindia Belanda atas Nusantara di masa depan. Di samping itu, pembicaraan yang terjalin di antara mereka, akan dapat mempertebal sikap kebencian pada Pemerintah Hindia Belanda. Snouck mengutip informasi dari suatu nota Konsul Belanda di Jeddah tanggal 12 September 1890 yang dialamatkan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Buitenzorg. Isinya adalah suatu keterangan tentang adanya hubungan jamaah haji asal Aceh dengan orang Aceh yang sebelumnya sudah menetap selama beberapa waktu di Mekkah. Petugas keamanan di Konsul Belanda di Jeddah dilaporkan menangkap sejumlah orang Aceh yang mencurigakan di sana.¹⁶

Kendati para guru tarekat dan pengikutnya dapat berpotensi menyulut

Islam: Reading the Intellectual Journey of Snouck Hurgronje," dalam *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 52, No. 1, 2014, h. 25-58.

¹⁴ Lebih lanjut lihat Siti Suniah, *Kritik terhadap Tarekat: Kajian terhadap Pemikiran Sayyid Usman bin Yahya*, Tesis (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015) h. 6.

¹⁵ Karel A. Steenbrink, *Beberapa aspek tentang Islam di Indonesia abad ke-19* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984) h. 134-137.

¹⁶ Hurgronje, *Nasihat Vol. I*, h. 35

kericuhan sosial sepulangnya dari Mekkah, Snouck bersikukuh agar Pemerintah Hindia Belanda tidak melakukan pembatasan pergi haji. Jika itu merupakan metode untuk memutus mata rantai anti-kolonialisme, maka itu bukanlah jalan yang tepat. Kebijakan tersebut justru akan menjadi bumerang yang merugikan pemerintah secara lebih luas. Umat Muslim akan menggagap Pemerintah Hindia Belanda anti terhadap ajaran Islam, dan yang terparah, dapat muncul pertikaian dengan alasan ini di banyak tempat dalam waktu yang sama.

Muncul suatu persepsi di kalangan pemerintan Hindia Belanda bahwa seorang pribumi yang pulang dari haji, ia mempunyai kemampuan dan wewenang lainnya pendeta dalam ajaran Nasrani. Dalam tulisannya, Snouck mengklarifikasi hal tersebut. Para haji tidak sama dengan ulama yang mempunyai keluasan pengetahuan tentang Islam. Tabiat dan pemahaman mereka tentang Islam kebanyakan tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang ada di lingkungannya. Mereka juga tidak mempunyai wewenang lebih untuk memerintahkan masyarakat setempat untuk melakukan sesuatu, khususnya perbuatan yang merugikan kepentingan kolonial.¹⁷

Namun, ungkapan Snouck di atas memang tidak bisa menjamah seluruh kaum muslim Nusantara. Seorang haji tetap dianggap sebagai pelita di tengah masyarakat. Pengalamannya berhaji ke Mekkah tetap dianggap sebagai kesempatan yang tidak mudah dimiliki oleh orang kebanyakan. Oleh sebab itu, tentu sulit untuk merubah persepsi warga pribumi tentang para haji. Setidaknya usaha Snouck memang ditujukan bagi para pegawai Hindia Belanda, agar mereka tidak salah tafsir yang berakibat ketakutan dan kecemasan saat menghadapi para haji.

Pada kesempatan lain, dalam tulisannya Snouck berupaya mencontohkan pula bahwa tidak semua ulama pribumi yang berkarir di Mekkah mempunyai kelangsungan atas kewibawaannya secara menyeluruh. Kesalahan atau suatu nilai yang merendahkan tetap tersemat padanya. Jika tidak pada dirinya sendiri maka datang dari keluarganya. Ini terlihat dari anak-anak Khatib Ahmad Sambas (Syekh Ahmad Khatib Sambas ?) yang tidak bisa melanjutkan kebesaran orang tuanya.

Di kalangan pemukim Jawa dan masyarakat Melayu yang bermukim di Mekkah, Khatib dikenal sebagai mahaguru dalam bidang tasawuf. Dua

¹⁷ C. Snouck Hugronje, *Nasihat-Nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936, Vol V* (Jakarta: INIS, 1990) h. 704.

anaknyanya, yakni Muhammad Yahya dan Abdul Gaffar, kendati mempunyai kesempatan hidup di Mekkah, nyatanya tidak dimanfaatkan untuk menempa diri dalam kajian Islam sehingga menjadi ulama yang mengikuti jejak ayahnya. Muhammad Yahya berprofesi sebagai syekh pendamping haji sedangkan adiknya tinggal di Singapura. Kendati mempunyai profesi yang berbeda dengan kakaknya, namun dari segi pemahaman agama, Gaffar lebih unggul. Padahal, keseharian Gaffar bukan menjadi seorang guru Islam. Terkadang ia lebih senang melancong ke kesultanan-kesultanan Melayu di Sumatera Timur dan pulang dengan membawa hadiah berupa uang yang cukup banyak. Semasa hidup, menurut Snouck, mereka berdua lebih banyak menghabiskan harta orang tuanya.¹⁸

Snouck menyarankan pada para pegawai kolonial dan pegawai pribumi yang bertugas menjadi bagian yang menangani haji agar lebih selektif dalam memilih calon haji. Mereka harus dipastikan tidak membawa agenda politik tertentu sepulangnya dari haji. Ini bisa dipastikan dengan menggelar semacam tes uji kompetensi yang didalamnya juga memuat soal-soal tentang hubungan haji, Islam dan pemerintahan.¹⁹

Snouck memperhatikan hampir setiap kebijakan haji yang digulirkan pemerintah. Pada 16 Agustus 1893, secara tertulis, ia melayangkan protesnya atas kebijakan pembelian karcis pulang pergi bagi jamaah haji yang berangkat ke Mekkah. Pemerintah Hindia Belanda beralih kebijakan tersebut digulirkan oleh sebab seringnya terjadi kasus jamaah haji yang gagal pulang akibat tidak mempunyai uang untuk membeli tiket pulang. Biasanya, mereka akan meminjam sejumlah uang kepada syekh yang bekerja sama dengan maskapai pelayaran untuk menyediakan tiket yang dibutuhkan. Celakanya, praktek tersebut, dianggap Snouck, penuh dengan kecurangan. Dengan leluasa, syekh dapat menentukan bunga pinjaman tersebut.²⁰ Akibatnya, saat ia tidak mempunyai rencana yang cukup untuk pengembalian, maka syekh akan menawarkan agar dirinya bekerja di perkebunan kelapa di Cocob dan lain sebagainya. Hasil dari pekerjaan itu digunakan untuk mengangsur utang kepada syekh.

Dari pernyataan di atas, sepertinya memang Snouck mempunyai perhatian terhadap jamaah haji asal Nusantara. Ia seperti tidak rela jika

¹⁸ Snouck, *Nasihah* Vol. V, h. 688-689.

¹⁹ Jacob Vredenburg, "The Haddj: Some of its features and functions in Indonesia," dalam *Bijdragen tot de taal-, land-en volkenkunde* 1ste Afl, 1962, h. 91-154.

²⁰ Hurgronje, *Nasihah* Vol. I, h. 40.

kesulitan yang ditimpa jamaah haji, menjadi peluang yang dimanfaatkan para syekh atau pengusaha perkapalan. Bagaimanapun, mereka adalah orang yang mempunyai hak konsumen, termasuk di bidang pelayanan sampai waktu kembalinya. Snouck melihat bahaya yang lebih besar apabila dalam relisasinya, pemerintah kolonial tidak mampu memfasilitasi haji bagi masyarakat pribumi. Ketidakpercayaan yang semakin meninggi akan memunculkan aneka praktik gelap yang melibatkan banyak pihak untuk meloloskan keberangkatan haji.

Pengelolaan haji yang baik akan membawa pengalaman positif sendiri bagi Pemerintah Hindia Belanda. Paska Perang Diponegoro, Pemerintah Hindia Belanda membutuhkan perbaikan agar dirinya dapat diterima penduduk pribumi. Usaha ini memang tidak bisa dibentuk secara instan, mengingat luka kolonialisme yang ditorehkan Belanda terlalu dalam di benah warga pribumi. Dengan menyediakan fasilitas perhajian diharapkan hal tersebut dapat mengobati luka tersebut, yang nantinya akan disusun dengan program-program pemberdayaan lainnya yang mengedepankan kepentingan masyarakat pribumi.²¹

Jika dihubungkan, kemudahan akses haji sebenarnya juga mendukung proyek politik etis yang di penghujung abad XIX mulai dicanangkan. Politik etis merupakan suatu langkah-langkah perbaikan citra kolonial di mata warga pribumi yang dianggap telah banyak membantu Kerajaan Belanda keluar dari masa-masa sulit akibat konflik politik Eropa yang berkepanjangan. Hasil keuntungan industri dari negeri jajahan Hindia Belanda, memberikan suntikan ekonomi yang besar agar Kerajaan Belanda dapat terus hidup. Sudah seyogyanya bantuan ini mendapatkan balasan yang setimpal, yang terealisasi dengan adanya politik etis.²²

Politik etis bertumpu pada pembenahan sektoral, yakni pertanian (irigasi/pengairan), edukasi (pendidikan) dan perpindahan penduduk (emigrasi). Kesempatan itu diberikan kepada rakyat pribumi sebagai bentuk balas budi atas banyaknya manfaat ekonomi yang diberikan Nusantara kepada Belanda. Namun jika diperhatikan, proyek-proyek kemanusiaan itu tidak lain untuk memperkuat posisi Belanda di Nusantara. Dengan adanya

²¹ Jeroen Touwen, "Paternalisme en protest. Ethische Politiek en nationalisme in Nederlands-Indië, 1900-1942", dalam *Leidschrift: Nederlands-Indië*, 15 Desember 2000, h. 67-94.

²² Henk Laloli, "Grenzen van de Ethische Politiek: het Technische Onderwijs en de Arbeidsmarkt in Nederlands-Indië, 1900-1941", dalam *Geraadpleegd* op 18, (2001).

pembenahan sumber daya manusia lewat pendidikan, maka pemerintah Hindia Belanda dapat memperoleh tenaga kerja bergaji murah, ketimbang harus mendatangkan dari Eropa. Persebaran penduduk membuat suatu wilayah berubah menjadi lokus produktif pertanian dan perkebunan. Begitu pula dengan pengairan yang mendongkrak produktivitas tanaman. Keuntungan tersebut tidak lain bermuara pada Kerajaan Belanda.

Saat masih hidup, tentu saja Snouck tidak akan mengutarakan secara lisan ataupun tertulis agenda ekonomi dan sosial Kerajaan Belanda tersebut. Di samping karena konteks yang berbeda, yang lebih penting adalah bagaimana agar emosi umat Islam tetap terjaga. Snouck tidak sepakat dengan konsep kekerasan yang ditunjukkan pemerintah kolonial saat menertibkan gejolak protes sosial warga pribumi. Jika ada langkah yang lebih lembut, maka itu hendaknya dipilih. Kebebasan beribadah bagi pribumi adalah sesuatu yang harus diperhatikan, meskipun mungkin orang Eropa tentu akan melemparkan pandangan yang sinis pada model keagamaan warga pribumi.²³

D. KESIMPULAN

Haji merupakan ritual yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mampu. Pada kenyataannya, kesanggupan finansial dan sehat jasmani saja tidak cukup, jika tidak ditunjang dengan fasilitas yang memadai. Di masa pendudukan kolonial Hindia Belanda, menunaikan haji menjadi kerumitan tersendiri. Hal ini dikarenakan adanya stigma negatif yang dialamatkan Kompeni kepada para haji yang kembali dari Tanah Suci, mereka berpotensi mengobarkan api kebencian terhadap pemerintah Hindia Belanda di kalangan masyarakat pribumi.

Snouck Hurgronje, penasehat dalam urusan pribumi dan orang Arab, melihat haji sebagai peluang seorang muslim untuk merubah diri. Mereka dapat menggunakan pengalamannya untuk menjelma menjadi orang yang dihormati penduduknya. Seorang haji tidak sama dengan pendeta dalam Nasrani. pengetahuan agama mereka hampir sama dengan masyarakat muslim pada umumnya, meskipun terdapat kelebihan dalam beberapa pengetahuan. Ia senantiasa memberikan masukan pada pemerintah untuk berhati-hati menangani para haji. Kebijakan yang digulirkan pemerintah hendaknya menyesuaikan pada keadaan masyarakat setempat. Yang

²³ Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda* (Jakarta: LP3ES, 1985) h. 114-130.

terpenting, menurut Snouck, jangan ada kebijakan yang mendiskriminasi perbatasan umat Muslim.

ريفيروسي

Sumber Primer

ANRI, Surat C Snouck Hugronje Kepada Direktur Pendidikan Agama dan Kerajinan, tertanggal Betawi, 26 September 1897.
Staatblad Van Nederlandsch-Indie 1902 No. 318.

Buku

- Azra, Azyumardi. *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*, Bandung: Mizan, 2002.
- Basyuni, Muhammad M. *Reformasi Manajemen Haji*, Jakarta: FDK Press, 2008.
- Hugronje, C. Snouck. *Nasihat-Nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936, Vol I*, Jakarta: INIS, 1990.
- _____. *Nasihat-Nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936, Vol V*, Jakarta: INIS, 1990.
- Lloir, Henry Chambert, Ed. *Naik Haji Masa Silam: Kisah orang-orang Indonesia Naik Haji 1482-1962*, Jakarta: KPG, EFEO, Forum Jakarta-Paris, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2013.
- Madjid, M. Dien. *Berhaji di Masa Kolonial*, Jakarta: CV. Sejahtera, 2008.
- _____. *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2014.
- _____. *Metode Sejarah*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Steenbrink, Karel A. *Beberapa aspek tentang Islam di Indonesia abad ke-19*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Suminto, Aqib. *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Suniah, Siti. *Kritik terhadap Tarekat: Kajian terhadap Pemikiran Sayyid Usman bin Yahya*, Tesis, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- Veer, Paul Van 'T. *Perang Belanda di Aceh*, Jakarta: PT Grafiti Pers, 1985.

Terbitan Berkala

Pandji Poestaka, No. 81, Tahoen XV, edisi 8 October 1937.

- Burhanudin, Jajat. "The Dutch Colonial Policy on Islam: Reading the Intellectual Journey of Snouck Hurgronje," dalam *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 52, No. 1, 2014.
- Khotimussalam, Mohammad "The Dutch Islamic Policies: Peran Politik Cristian Snouck Hurgronje Di Wilayah Hindia-Belanda", dalam *Jurnal Tamaddun*, Vol. 7, No. 1, 2019.
- Laloli, Henk. "Grenzen van de Ethische Politiek: het Technische Onderwijs en de Arbeidsmarkt in Nederlands-Indië, 1900-1941", dalam *Geraadpleegd op 18*, 2001.
- Muslim, Muhammad Irfai. "Historiografi Manajemen Haji Di Indonesia: Dinamika Dari Masa Kolonial Hingga Kemerdekaan", dalam *Jurnal MD*, Vol. 6, No. 1, 2020.
- Touwen, Jeroen. "Paternalisme en protest. Ethische Politiek en nationalisme in Nederlands-Indië, 1900-1942", dalam *Leidschrift: Nederlands-Indië*, 15 December 2000.
- Vredembregt, Jacob. "The Haddj: Some of its features and functions in Indonesia," dalam *Bijdragen tot de taal-, land-en volkenkunde* 1ste Afl, 1962.

On Line

<https://repositori.kemdikbud.go.id/19241/1/2012%20-%20Christian%20Snouck%20Hurgronje.pdf>, diakses tanggal 11 April 2023.

إسلام نوسنتارا: أنتارا أرڇومين فوليتيس,
سڤيربتوال, دان أيفيستيمولوكيس
عاريف بوديمان

كيلاهيران دان فيركيمباغان ليسبومي: سواتو
ستودي هيبستوريس
جوهان وهيودي

فيلكسانان إباداه حاجي ماسا هينديا بيلاندا:
تيلجاوان كريتيس تيرهاداف قيمكيران
چ. سناوچك هوڇرونجي
ليسي مزياتي دان أندريانشاه

سنتراتيڇي كيأمانان ماريتيم سيغافورا دان
دامڇكبا باڇي ايندونيسيا
فراديتو كوموجويو

إيمڇليمينتاتياون ڇاف دالام كيببجاكان
قيمبيريان بياأسيسوا سيسنوا أوغڇول فاقوا
دي لوار نيڇيري
محمد رجال أوتو

أيفيڇنتيفيتاس سنتراتيڇي ديراديكالياساسي قادا
نارافيدانا تيروريسمي دي روتان ڇيكيأس
دبني قرويواتي